

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian mempunyai kedudukan dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Menurut BPS Indonesia, persentase PDB sektor pertanian sebesar 12,37% tahun 2019; 12,54% tahun 2018; 12,69% tahun 2017; 12,84% tahun 2016; dan 13,04% tahun 2015. Sektor pertanian juga memiliki peran strategis pada pembangunan ekonomi Indonesia dalam pembentukan modal; pangan; bahan baku industri; *bioenergi*; tenaga kerja; dan pelestarian lingkungan (Sakinah, Purwati, dan Jamilah, 2018).

Peran strategis sektor pertanian menjadi bagian dari agenda pembangunan ekonomi Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara. Kedaulatan negara dapat dijaga melalui agenda kedaulatan pangan. Agenda kedaulatan pangan terdapat pada UU No.18 tahun 2012 merupakan revisi dari UU No.7 tahun 1996. Agenda kedaulatan pangan memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan produksi pangan yang dapat mencukupi kebutuhan setiap rumah tangga secara berkelanjutan. Konsep berkelanjutan pada pangan ini dapat diperoleh dengan memperhatikan perencanaan pangan. Pasal 7 UU nomor 18 tahun 2012, terdapat aspek dalam perencanaan pangan terdiri dari pertumbuhan dan sebaran penduduk; kebutuhan konsumsi pangan; ketersediaan lahan; rencana tata ruang wilayah, dan konsep berkelanjutan.

Peran strategis pangan dilihat dari kontribusi PDB sub sektor tanaman pangan dan ketersediaan pangan. Menurut BPS Indonesia, persentase PDB Sub sektor tanaman pangan sebesar 2,68% tahun 2019; 2,86% tahun 2018; 2,96% tahun 2017; 3,04% tahun 2016; dan 3,12% tahun 2015. Dari sisi ketersediaan, pangan menjadi kunci pemenuhan kebutuhan pokok penduduk Indonesia. Berdasarkan data konsumsi dari Kementerian Pertanian (2018), pangan yang menjadi kebutuhan pokok dari 90% penduduk Indonesia merupakan beras.

Ketersediaan beras dilihat dari proyeksi perkembangan penduduk per tahun sebesar 1,19% pada periode tahun 2016-2020 cenderung meningkat. Dari angka per kapita, mengkonsumsi beras per kapita menyusut dari 107,71 kilogram/kapita/tahun pada tahun 2002 jadi 97,45kg/kapita/tahun pada tahun

2017. (Kementerian Pertanian, 2018). Kondisi ini menunjukkan total konsumsi beras dalam negeri akan meningkat bersamaan dengan pertumbuhan penduduk.

Kenaikan konsumsi beras dapat dilihat dari data pengeluaran untuk konsumsi makan berbahan baku beras dalam Rumah Tangga di Indonesia periode 2014-2018. Menurut Kementerian Pertanian (2019), jumlah pengeluaran untuk konsumsi beras bagi penduduk Indonesia meningkat sebesar 6,60% dari Rp1,150 juta/kapita/tahun pada tahun 2014 menjadi Rp1,484 juta/kapita/tahun pada tahun 2018. Angka ini dikoreksi dengan inflasi, pengeluaran untuk konsumsi beras secara riil meningkat sebesar 1,28%. Pertumbuhan konsumsi beras nominal serta riil dari pengeluaran rumah tangga di Indonesia tahun 2014-2018 tersaji pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Konsumsi Beras Nominal serta Riil dari Pengeluaran Rumah Tangga di Indonesia, 2013-2017

| No | Keterangan | Tahun (Rupiah/Kapita) | | | | | Pertumbuhan % |
|----|------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | Nominal | 1.150.497 | 1.235.309 | 1.287.042 | 1.383.089 | 1.484.872 | 6,60 |
| 2 | IHK*) | 110,89 | 123,04 | 127,50 | 128,49 | 136,36 | 5,37 |
| 3 | Riil | 1.037.512 | 1.003.990 | 1.009.458 | 1.076.418 | 1.088.935 | 1,28 |

Sumber: BPS Indonesia, diolah Kementerian Pertanian (2019)

Produksi beras yang dikatakan cukup memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk Indonesia dapat dilihat dari penyediaan dan konsumsi beras di Indonesia tahun 2014-2018. Penyediaan beras menunjukkan kenaikan dari 41.161.877 (ton) tahun 2014 menjadi 48.239.302 (ton) tahun 2018. Namun, penyediaan beras yang meningkat bersamaan dengan impor beras meningkat dari 842.770 (ton) tahun 2014 menjadi 2.254.292 (ton) tahun 2018. Penyediaan, impor dan konsumsi beras di Indonesia tahun 2014-2018 tersaji pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Penyediaan, Impor, dan Konsumsi Beras di Indonesia, 2014-2018

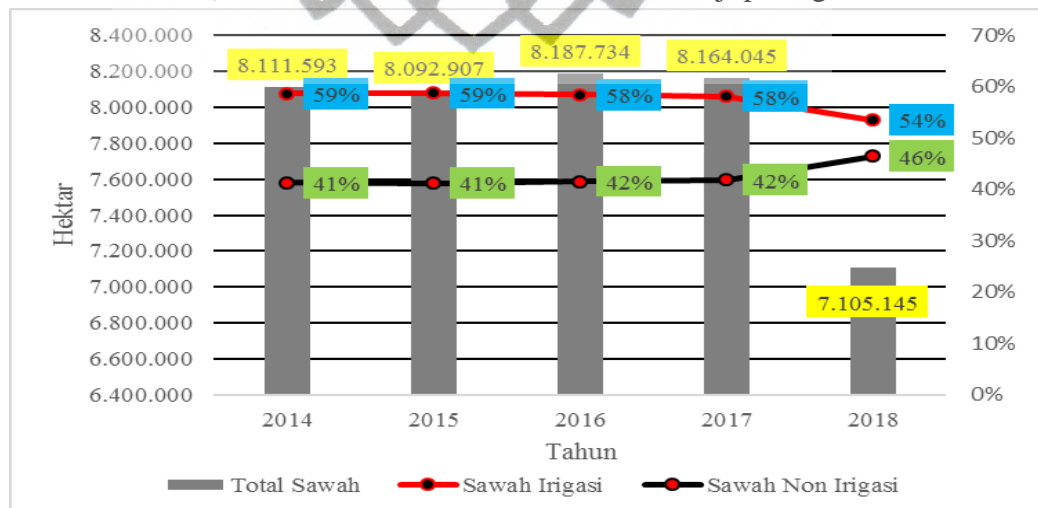
| No | Keterangan | Tahun | | | | |
|----|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Beras Tersedia ((GKG keBeras 62,74%**) - Susut)) | 40.132.830 | 42.728.814 | 44.962.138 | 45.973.025 | 47.033.319 |
| 2 | Impor (Ton) | 842.770 | 860.188 | 1.281.042 | 304.381 | 2.254.292 |
| 3 | Ekspor (Ton) | 2.941 | 1.902 | 2.247 | 4.349 | 3.996 |
| 4 | Konsumsi (penduduk x tktkonsumsi) | 28.779.569 | 29.292.929 | 29.626.284 | 29.162.047 | 29.475.151 |

Sumber: Kementerian Pertanian (2019)

**) Tahun 2019 menggunakan angka konversi 64,02% (hasil survei konversi gabah beras-BPS, 2018)

Data penyediaan dan konsumsi beras tersebut menunjukkan ketersediaan pangan tercukupi untuk penduduk Indonesia. Namun, aspek untuk tahap kedaulatan pangan pada pasal 7 UU No.18 tahun 2012 masih belum tercapai. Kenaikan impor beras dan alih fungsi lahan sawah produktif menjadi aspek yang perlu diperhatikan sebagai kendala dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Dampak penurunan luas lahan sawah produktif meliputi produksi pangan menurun; kontribusi PDRB sektor pertanian menurun; kehilangan potensi irigasi lahan pertanian; perubahan kultur pertanian masyarakat; kerusakan lingkungan; dan kemiskinan meningkat (Kementerian Pertanian, 2018).

Menurut data statistik lahan pertanian dari Kementerian Pertanian (2018), luas lahan sawah menurun sebesar 1.006.448 hektar dari 8.111.593 hektar pada tahun 2014 menjadi 7.105.145 hektar pada tahun 2018. Persentase lahan sawah beririgasi menyusut dari 59% pada tahun 2014 menjadi 54% pada tahun 2018. Persentase sawah beririgasi menurun bentuk kerugian investasi irigasi pertanian yang dibangun oleh pemerintah. Dari sisi produksi padi, data ringkasan produksi padi menunjukkan produksi padi tahun 2019 menurun sebanyak 4,6 juta ton atau 7,75% dari produksi 56,54 juta ton tahun 2018 (BPS Indonesia, 2019). Luas Lahan Sawah di Indonesia tersaji pada grafik 1.1.



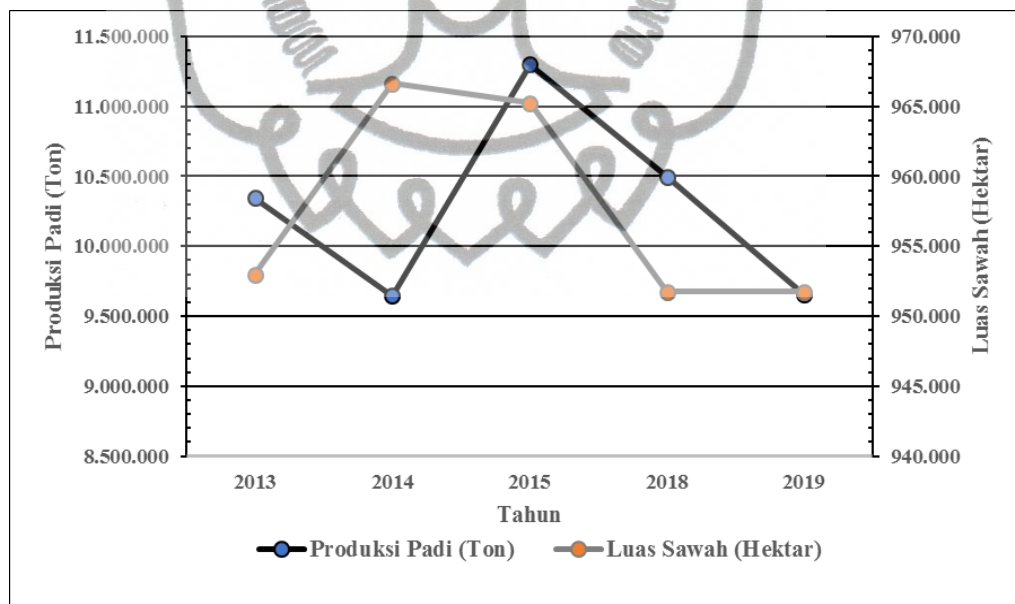
Sumber: Statistik Lahan Pertanian dari Kementerian Pertanian (2018)

Grafik 1.1 Luas Lahan Sawah di Indonesia

Menurut Mulyani, Kuncoro, Nursyamsi, dan Agus (2016), lahan sawah cenderung berlokasi pada kelerengan datar memiliki aksesibilitas tinggi dan dekat sumber air. Kondisi tersebut sesuai kebutuhan lahan pembangunan sektor

di luar pertanian dan mendukung untuk alih fungsi lahan sawah. Alih fungsi lahan sawah dapat meningkatkan nilai ekonomi lahan seperti penerimaan pajak tanah yang lebih tinggi dari lahan sawah dan skala usaha sektor non pertanian lebih tinggi dari lahan sawah. Nilai ekonomi tersebut yang menjadi kendala dalam pengendalian alih fungsi lahan sawah. Menurut Kementerian Pertanian (2018), Provinsi dan Kabupaten yang mengajukan peninjauan untuk pengurangan luas lahan sawah pada tata ruang wilayah tahun 2018 seperti Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur; wilayah Jabodetabekpuncur untuk meningkatkan nilai ekonomi lahan.

Provinsi Jawa Tengah menyumbang produksi padi nasional. Kontribusi Jawa Tengah Tahun sebesar 14,37% dari produksi padi nasional pada periode 2013 hingga 2015. Produksi padi Jawa Tengah menurun sebesar 689.152,02 ton dari 10.344.816 ton tahun 2013 menjadi 9.655.663,98 ton tahun 2019 bersamaan luas lahan sawah berkurang sebesar 1.228 hektar pada tahun 2013-2018. Produksi padi dan luas lahan sawah Jawa Tengah tersaji pada grafik 1.2.



Sumber: BPS Jawa Tengah (2015 & 2019); Statistik Lahan Kementerian Pertanian (2018)

Grafik 1.2 Produksi Padi dan Luas Lahan Sawah Jawa Tengah, 2013-2019

Produksi beras Jawa Tengah menurun sebesar 482.811,97 ton dari 6.006.781,01 ton tahun 2018 menjadi 5.523.969,04 ton tahun 2019. Pada Tahun 2019, penurunan produksi beras terjadi pada 9 Kabupaten dan peningkatan produksi beras terjadi pada 4 Kabupaten dari 13 daerah lumbung

beras Jawa Tengah. Produksi beras daerah lumbung beras Jawa Tengah tersaji pada tabel 1.3.

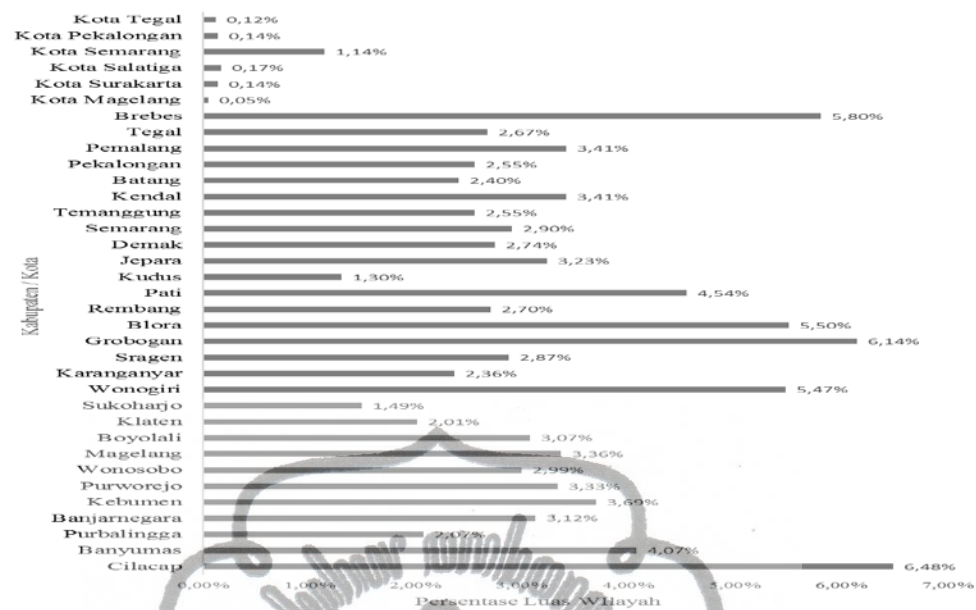
Tabel 1.3 Produksi Beras Daerah Lumbung Beras Jawa Tengah, 2018-2019

| No | Daerah | Produksi beras (Ton) | | Pertumbuhan (Ton) |
|-------------|-----------|----------------------|--------------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 | |
| 1 | Grobogan | 456.201,77 | 441.957,07 | -14.244,70 |
| 2 | Cilacap | 453.824,50 | 400.447,57 | -53.376,93 |
| 3 | Sragen | 389.934,17 | 438.233,21 | 48.299,04 |
| 4 | Demak | 399.201,63 | 381.097,32 | -18.104,31 |
| 5 | Pati | 331.207,28 | 338.738,39 | 7.531,11 |
| 6 | Blora | 348.012,21 | 304.133,86 | -43.878,35 |
| 7 | Kebumen | 283.629,87 | 244.379,90 | -39.249,97 |
| 8 | Brebes | 282.947,02 | 238.171,62 | -44.775,40 |
| 9 | Wonogiri | 265.772,57 | 195.296,85 | -70.475,72 |
| 10 | Pemalang | 222.614,93 | 232.589,68 | 9.974,75 |
| 11 | Klaten | 231.821,62 | 205.175,66 | -26.645,96 |
| 12 | Tegal | 236.700,29 | 174.270,14 | -62.430,15 |
| 13 | Sukoharjo | 194.050,11 | 194.195,61 | 145,50 |
| Jawa Tengah | | 6.006.781,01 | 5.523.969,04 | -482.811,97 |

Sumber: Data Diolah dari BPS Jateng (2018-2019)

Produksi beras Kabupaten Sukoharjo meningkat sebesar 145,5 Ton dari tahun 2018 hingga 2019. Kondisi ini menarik untuk dikaji dengan luas wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo memiliki luas wilayah sebesar 1,49% dari 32.800,69 Km² luas wilayah Jawa Tengah. Persentase luas wilayah Kabupaten Sukoharjo menempati peringkat ke dua setelah Kabupaten Kudus sebagai luas wilayah Kabupaten terkecil di Jawa Tengah. Persentase Luas wilayah Jawa Tengah menurut Kabupaten atau Kota tersaji pada grafik 1.3.

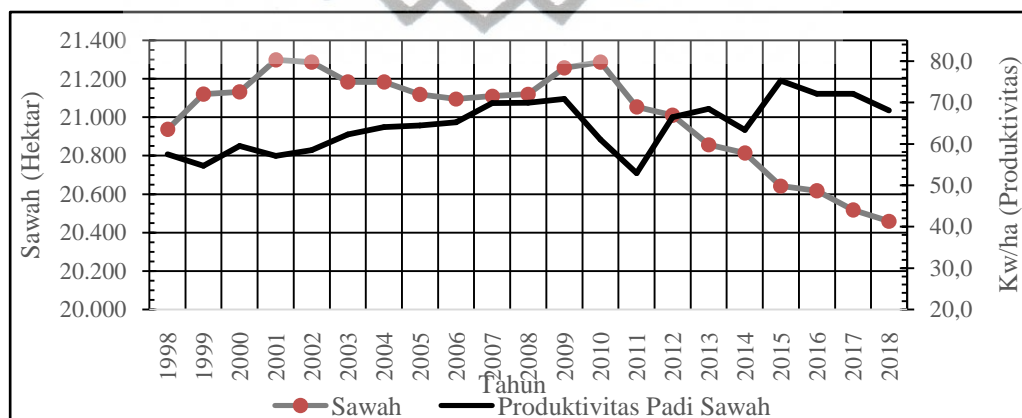
Dari tabel 1.3, Kabupaten Karanganyar dan Boyolali bukan merupakan daerah lumbung beras di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2018 hingga 2019. Produksi beras Kabupaten Karanganyar menurun 8.001,26 ton dari 161.227,49 ton tahun 2018 menjadi 153.466,97 ton tahun 2019. Kabupaten Boyolali meningkat 1.730,07 Ton dari 152.710,52 ton tahun 2018 menjadi 154.440,59 ton tahun 2019. Sedangkan Kabupaten Sukoharjo dengan luas wilayah yang lebih kecil dari Kabupaten Karanganyar dan Boyolali termasuk lumbung beras di Jawa Tengah. Produksi Beras Kabupaten Sukoharjo meningkat sebesar 145,5 Ton dari 194.050,11 Ton pada tahun 2018 menjadi 194.195,61 Ton pada tahun 2019.



Sumber: Diolah dari BPS Jawa Tengah Dalam Angka (2019)

Grafik 1.3 Persentase Luas Wilayah Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota

Lahan Sawah Kabupaten Sukoharjo cenderung beralih fungsi. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan luas lahan sawah yang menurun dari tahun 1998 hingga 2018. Luas lahan sawah yang menurun dapat berdampak bagi produksi padi dalam jangka panjang. Lahan sawah merupakan salah satu sumber daya alam bagi produksi padi. Menurut Kementerian Pertanian (2018), produksi padi akan berdampak pada produksi beras. Luas lahan dan produktivitas padi sawah Kabupaten Sukoharjo tersaji pada grafik 1.4.



Sumber: Data diolah dari Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka (2002-2019)

Grafik 1.4 Luas Sawah dan Produktivitas Padi Kab. Sukoharjo, 1998-2018

Dari grafik 1.4, Kabupaten Sukoharjo mampu meningkatkan produktivitas padi sawah bersamaan dengan alih fungsi lahan sawah. Alih fungsi lahan sawah ditunjukkan dengan luasan yang menurun. Fenomena tersebut bertentangan dengan kajian alih fungsi lahan sawah terhadap produksi

padi. Hasil kajian Irawan (2005); Purwaningsih, Sutomo, dan Istiqomah (2015); KPK (2016); Hairuddin, Baja, dan Wikantari (2017); serta Kementerian Pertanian (2018) menemukan bahwa produksi padi sawah cenderung menurun bersamaan dengan luas lahan sawah yang menurun.

Dari grafik 1.4, Produktivitas padi cenderung meningkat bersamaan dengan luas lahan sawah meningkat pada tahun 1998-2009. Pola berubah dari tahun 2010-2018, produktivitas padi dan luas lahan sawah memiliki hubungan berlawanan. Pada Tahun 2018, laju pertumbuhan luas sawah sebesar -0,28%. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk 0,78% tahun 2018 (BPS Sukoharjo, 2018). Kondisi ini mengkhawatirkan bagi keseimbangan penawaran dan permintaan beras Kabupaten Sukoharjo. Perkembangan luas sawah, padi sawah dan penduduk tersaji pada tabel 1.4.

Tabel 1.4 Perkembangan Luas Sawah, Produksi Padi Sawah, dan Penduduk Kabupaten Sukoharjo, 1998-2018

| No | Tahun | Perkembangan (%) | | | Penduduk (Jiwa) |
|----|-------|------------------|---------------------|----------|--------------------|
| | | Luas Sawah | Produksi Padi Sawah | Penduduk | |
| 1 | 1998 | 0,76 | 0,00 | 0,01 | 768.421 |
| 2 | 1999 | 0,87 | -8,8 | 1,00 | 776.107 |
| 3 | 2000 | 0,06 | 16,6 | 1,57 | 788.326 |
| 4 | 2001 | 0,79 | -6,7 | 0,93 | 795.680 |
| 5 | 2002 | -0,05 | -6,0 | 0,86 | 802.502 |
| 6 | 2003 | -0,48 | 1,9 | 0,79 | 808.811 |
| 7 | 2004 | 0 | 7,6 | 0,78 | 815.089 |
| 8 | 2005 | -0,31 | 1,8 | 0,75 | 821.213 |
| 9 | 2006 | -0,11 | 7,8 | 0,62 | 826.289 |
| 10 | 2007 | 0,07 | 0,1 | 0,64 | 831.613 |
| 11 | 2008 | 0,05 | 4,5 | 0,68 | 837.279 |
| 12 | 2009 | 0,64 | -8,4 | 0,70 | 843.127 |
| 13 | 2010 | 0,14 | -15,4 | 0,46 | 846.978 |
| 14 | 2011 | -1,09 | -27,1 | 0,98 | 851.157 |
| 15 | 2012 | -0,21 | 81,7 | 0,94 | 857.421 |
| 16 | 2013 | -0,72 | -4,9 | 0,91 | 863.693 |
| 17 | 2014 | -0,21 | -5,7 | 0,88 | 869.481 |
| 18 | 2015 | -0,82 | 20,7 | 0,86 | 875.917 |
| 19 | 2016 | -0,13 | 4,6 | 0,83 | 881.512 |
| 20 | 2017 | -0,48 | 0 | 0,78 | 871.397 |
| 21 | 2018 | -0,28 | -13,4 | 0,78 | 885.205 |

Sumber: BPS Sukoharjo Dalam Angka (2011,2017,2019)
BPS Jawa Tengah Dalam Angka (2019)

Luas lahan sawah yang menurun bertentangan dengan konsep kebijakan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Kebijakan penetapan

LP2B merupakan amanat dari UU No 41 tahun 2009 sebagai upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah. Kabupaten Sukoharjo menetapkan 23.742 hektar sebagai LP2B dalam Peraturan Daerah (Perda) No 14 Tahun 2011 dan Perda No 1 Tahun 2018 tentang tata ruang wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Perubahan fungsi lahan sawah juga menumbuhkan konflik tata ruang wilayah. Contoh kasus konflik tata ruang wilayah yang diberitakan sampai tingkat nasional yaitu konflik warga dengan PT RUM. Selain contoh PT RUM, beberapa konflik tata ruang wilayah terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Konflik tata ruang wilayah seharusnya dapat dihindari. Konflik tata ruang wilayah Kabupaten Sukoharjo tersaji pada tabel 1.5.

Tabel 1.5 Konflik Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo

| No | Tahun | Keterangan |
|----|-------|--|
| 1 | 2020 | Puluhan Sertifikat ganda dilaporkan ke Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Sukoharjo |
| 2 | 2020 | Sengketa tanah sawah bengkok suatu desa di Kec. Grogol |
| 3 | 2019 | Sengketa pelunasan sawah yang telah diubah fungsi untuk kawasan industri di Kec. Bendosari |
| 4 | 2019 | Demonstrasi warga atas pencemaran yang diduga dilakukan oleh PT RUM |
| 5 | 2018 | Penangkapan Pengamat lingkungan hidup saat demonstrasi dugaan pencemaran PT RUM |
| 6 | 2018 | Kasus Korupsi perizinan pendirian menara |
| 7 | 2017 | Warga sekitar PT RUM mengungsi di depan rumah dinas Bupati Sukoharjo |
| 8 | 2016 | Penutupan saluran irigasi sawah dilakukan sepihak oleh pengembang perumahan |
| 9 | 2016 | Pencemaran limbah ciu pada irigasi sawah di Desa Pranan, Kec. Polokarto dan Bekonang, Kec. Mojolaban |
| 10 | 2015 | Sengketa kepemilikan tanah sawah di Kec. Kartasura |

Sumber: Kumparan; Tribatanews.sukoharjo.polri; Kompas; Merdeka; Solopos; titro.id; dan Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Isu alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Sukoharjo telah menarik perhatian para peneliti. Penulis dapat merangkum tujuh penelitian terdahulu yang mengkaji fenomena alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian Sudiyono (2000) menemukan bahwa modernisasi kelembagaan lokal yang dilakukan oleh Pemerintah berperan untuk meningkatkan produktivitas padi saat terjadi penurunan luas lahan sawah di Desa Celep Kecamatan Nguter. Penelitian Firman (2000) menemukan bahwa masing-

masing Pemerintah Pusat dan Makela Tanah berperan dalam penurunan luas lahan sawah di daerah untuk perumahan dan penentuan harga tanah. Penelitian Sutanta (2010) membahas strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas Kawasan Industri Besar Nguter yang telah dibahas sejak tahun 1991 dan secara tidak langsung berdampak pada penurunan luas lahan sawah.

Penelitian Nurjayanti (2011) meramalkan dengan metode ARIMA bahwa penurunan luas lahan sawah yang tidak terkendali akan berdampak pada penurunan produktivitas padi tahun 2011-2015. Prediksi tersebut berbeda dengan fenomena yang ditunjukkan pada grafik 1.6. Penelitian Rahmayana dan Handayani (2016) secara tidak langsung mengkaitkan perluasan Kawasan Solo Baru dengan penurunan luas lahan sawah berdampak pada peningkatan pendapatan dan perubahan sosial penduduk lokal. Penelitian Nurhidayah dan Karjoko (2017) mengungkapkan bahwa penetapan Nguter sebagai Kawasan Industri Besar tidak melibatkan peran masyarakat lokal. Penelitian tersebut melihat dari aspek keadilan hukum yang diterima masyarakat lokal dan secara jelas membahas penurunan luas lahan sawah di Kecamatan Nguter. Penelitian Pujianti (2020) dengan metode OLS menunjukkan luas lahan sawah dipengaruhi oleh panjang jalan; jumlah perusahaan; jumlah penduduk; dan PDRB Sektor pertanian.

Tujuh penelitian tersebut belum ada yang membahas peran aktor dalam dinamika alih fungsi sawah. Penelitian Firman dan Sutanta secara singkat telah membahas salah satu aktor yang terlibat yaitu peran Makelar tanah dan Pemerintah. Kekurangan penelitian Firman tidak mengungkapkan fenomena di Kabupaten Sukoharjo dan cenderung melihat fenomena Indonesia selama tahun 1990-an. Sedangkan penelitian Sutanta berfokus pada kebijakan Pemerintah Daerah untuk Kawasan Industri Besar Nguter.

Selain keterlibatan aktor dalam dinamika alih fungsi sawah, peran Pemerintah Daerah menjaga neraca beras juga belum banyak dibahas. Penelitian Sudiyono lebih banyak membahas pengaruh kebijakan modernisasi kelembagaan lokal petani dari Kebijakan Pemerintah Pusat. Sedangkan, penelitian Nurjayanti hanya secara singkat membahas peran Pemerintah Pusat

dalam produksi beras di Kabupaten Sukoharjo. Kekurangan pembahasn pada kedua tema tersebut, peneliti mengambil judul “Keterlibatan para aktor dalam dinamika alih fungsi lahan sawah dan peran pemerintah menjaga neraca beras di Kabupaten Sukoharjo”

B. Rumusan Masalah

Identifikasi masalah yang telah dijelaskan pada latar belakang peneitian ini. Rumusan masalah penelitian dapat dirinci:

1. Apa peran para aktor dalam dinamika alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Sukoharjo?
2. Apa peran pemerintah daerah dalam menjaga neraca beras bersamaan dengan luas lahan sawah yang menurun di Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat dideskripsikan berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan peran para aktor dalam dinamika alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Sukoharjo.
2. Mendiskripsikan peran pemerintah daerah dalam menjaga neraca beras bersamaan dengan luas lahan sawah yang menurun di Kabupaten Sukoharjo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang dideskripsikan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian memberikan informasi peran para aktor dalam dinamika alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Sukoharjo.
2. Hasil penelitian memberikan informasi peran pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan neraca beras bersamaan dengan luas lahan sawah yang menurun di Kabupaten Sukoharjo.